

## **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM SD) DI KECAMATAN SAMBAS**

**Oleh:**  
**Ghafuur Kharisma Ramadhan**  
**NIM. E42010003**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015  
Email : [ghafuur.kharisma@yahoo.com](mailto:ghafuur.kharisma@yahoo.com)

### **Abstrak**

Program BSM merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah putus sekolah pada usia dini, program BSM juga dimaksudkan agar siswa miskin yang telah tamat dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi dengan pendidikan yang layak. Namun kebijakan yang diambil pemerintah masih belum optimal, dikarenakan masih ada siswa miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BSM sedangkan terdapat siswa mampu yang mendapat dana BSM.

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memang sangat mempengaruhi efektifitas Implementasi Program BSM tetapi faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi orang tua siswa sangat mempengaruhi bagi terlaksananya program BSM SD dengan efektif. Sehingga dibutuhkan peningkatan partisipasi dari orang tua siswa miskin tersebut. Implementor dituntut menemukan strategi untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa, seperti meningkatkan koordinasi dengan kepala Desa sebagai pihak yang mengeluarkan kartu KPS sebagai syarat utama penerima BSM.

**Kata-kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

# **IMPLEMENTATION OF POOR ELEMENTARY STUDENTS HELP PROGRAM(BSM SD) IN SAMBAS SUB-DISTRICT**

**By:**  
**Ghafuur Kharisma Ramadhan**  
**NIM. E42010003**

Governmental Science Study Program Faculty of Social Sciences and Political  
Science cooperate with the Provincial Government of West Borneo, 2015  
Email : [ghafuur.kharisma@yahoo.com](mailto:ghafuur.kharisma@yahoo.com)

## **Abstract**

Poor Elementary Students Help Program Is a program which is launched by government to overcome dropout problem at an early age, so that poor students who have graduated can continue their education to a higher level with a decent education. But the measures taken by government hasn't optimal because there are poor students who are not listed as the receiver of Poor Elementary Students Help Program whereas there are capable students who receive the fund. The conclusion of this research is that the factors like communication, resources, disposition and bureaucratic system are really influencing the effectivity of implementation of Poor Elementary Students Help Program but the external factors like the lack of student's parents participation has influencing as well. The implementor be charged to find the strategy to improve student's parents participation , such as improving the coordination with the village's head as the one who publish the KPS card as the BSM receiver main requirement.

**Key Words:** Implementation of wisdom, Communication, Resource, Disposition, and Bureaucracy structure



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan, banyak masyarakat di Indonesia hidup didalam kemiskinan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, seperti pemberian subsidi kepada masyarakat miskin. Subsidi tersebut biasa berbentuk program-program pemerintah yang bersifat langsung menyentuh masyarakat kelas bawah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Beras Miskin (Raskin). Program-program tersebut hanya sebagian dari program-program yang pemerintah luncurkan untuk membantu masyarakat dalam melawan kemiskinan. Tetapi harus disadari untuk membentuk suatu bangsa yang maju tidak hanya di lihat dari aspek sosial saja, tetapi masih ada aspek yang menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa dikatakan maju. Salah satunya pendidikan, pendidikan sangat erat hubungannya dalam membangun suatu

bangsa yang maju. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan hal yang sangat berperan bagi membentuk sumber daya manusia unggul yang akan memajukan bangsa tersebut. Sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat mengolah sumber daya yang lain dengan efektif sehingga hasil pengolahannya dapat optimal.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah meluncurkan program-program yang diharapkan dapat membangun generasi yang unggul, melalui-program-program tersebut pemerintah berharap masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satunya program pemerintah yang diharapkan dapat membantu siswa-siswanya dalam bidang pendidikan adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program BSM merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih berusia dini putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya.

Program BSM sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah pada usia dini. Hal ini disebabkan oleh keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk berkerja. Masalah inilah yang sebenarnya ingin dipecahkan oleh pemerintah agar siswa yang berasal dari keluarga miskin dapat menyelesaikan sekolahnya dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program BSM diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), selanjutnya diteruskan kemasyarakat melalui Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi dan Kabupaten. Program BSM seterusnya dilaksanakan oleh implementor langsung yaitu sekolah untuk melaksanakan penyaluran dana program BSM ini. Dana Program BSM diberikan kepada siswa-siswi yang

kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Fenomena-fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih ada terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana BSM serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana BSM ini. padahal sejatinya pemerintah meluncurkan program ini untuk membantu siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Adapun fungsi dari dana BSM yaitu untuk membeli keperluan sekolah siswa-siswa seperti buku dan seragam serta biaya lainnya yang masih menyangkut masalah pendidikan anak.

Masalah lainnya yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang untuk dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa tersebut. Otomatis dana tersebut di kelola oleh orang tua siswa dan pihak sekolah sebagai implementor cukup

sulit melakukan pengawasan akan penggunaan dana tersebut.

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kecamatan Sambas.

## 3. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran di bidang akademik mengenai implementasi kebijakan sehingga dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya study ilmu kebijakan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk disempurnakan, selain itu agar dapat digunakan dan diterapkan

## **B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI**

### 1. Kerangka teori

Thomas Dye (dalam Subarsono, 2006:2) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is what ever governments choose to do or not to do*). Dimaksudkan Dye dalam pernyataannya diatas adalah bahwa pemerintah dapat membuat pilihan akan keputusannya dalam menanggapi suatu masalah sosial yang terjadi didalam masyarakat. Misalnya, pemerintah harus membuat peraturan tentang pendidikan atau tidak membuat program bantuan bagi siswa miskin.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Dunn (2003:22) proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dari tahap-tahap tersebut, penelitian penulis lebih mengarah kepada tahap implementasi kebijakan.

Setelah tahap formulasi kebijakan dilakukan maka tahap selanjutnya adalah tahap implementasi kebijakan. Setiap kebijakan yang telah disahkan harus diimplementasikan oleh aparat pemerintah. Sehingga seharusnya kebijakan yang telah disahkan merupakan kebijakan yang telah diramalkan kedepannya sebagai solusi bagi masalah yang timbul.

Implementasi merupakan tahap yang menentukan, karena pada tahap inilah sebuah kebijakan dapat ditentukan berhasil atau tidak, apabila pada tahap implementasi ini tidak optimal bahkan terjadi penyimpangan maka dapat dikatakan kebijakan tersebut gagal. Senada dengan pernyataan tersebut, Awang (2010:31) berpandangan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” bila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn menyatakan implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan

baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65). Sedangkan, Menurut Erwan dan Dyah (2012:21) mendefinisikan implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini penulis akan menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh

George Edward III karena dianggap cocok dalam melakukan penelitian ini.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward III dalam Widodo, 2011:96-110).

#### **a. Komunikasi (*Communication*)**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada

pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

#### **b. Sumber Daya (*Resources*)**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)
- 2) Anggaran (*Budgetary*)
- 3) Fasilitas (*facility*)

4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

#### **c. Disposisi (*Disposition*)**

Kecenderungan perilaku atau sikap dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan orang yang bersangkutan. Dengan mengetahui sikap seseorang orang dapat menduga bagaimana respon atau perilaku yang akan diambil oleh orang bersangkutan, terhadap sesuatu masalah atau keadaan yang

dihadapkan kepadanya. Sikap menurut bimo walgito (2003:110-111) merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relative ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. Pengertian sikap mengandung komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Selanjutnya gerungan (dalam walgito 2003:110) memberikan pengertian bahwa “*attitude* itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangannya atau sikap perasaan, tetapi sikap mena disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi. Jadi *attitude* itu lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap sesuatu hal”.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang

baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### **d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya

akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan situasi tertentu yang berlangsung di SDN 12 Sungai Pinang, SDN 16 Saing Rambli, dan SDN 20 Kampung Lorong sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data saat penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian disini adalah sasaran dan implentor, yang didalam implementasi kebijakan adalah manusia. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sambas, Kepala Sekolah Dasar bersangkutan, dan orang tua Siswa sebagai sasaran.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Komunikasi Pada Program BSM SD

Komunikasi merupakan faktor pertama yang harus dipenuhi dalam

melaksanakan suatu kegiatan termasuk implementasi aturan karena seseorang akan dapat melaksankan atau menaati aturan apabila sebelumnya ia telah diberitahu. Proses inilah yang harus memerlukan komunikasi yang baik, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi *miss communication* yang tentunya akan menyebabkan banyak hal yang tidak sesuai aturan atau tidak diinginkan. Agar implementasi program BSM SD dapat disalurkan secara efektif dan tujuan program tersebut tercapai implementor harus memahami apa saja yang harus dilakukan agar komunikasi dapat terlaksana dengan baik, Edward III membagi komunikasi kedalam tiga unsur yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dengan memperhatikan tiga unsur tersebut dan berdasar pada pengertian komunikasi secara lebih rinci diatas tentang bagaimana mengkomunikasikan suatu aturan secara lebih baik pada sebuah organisasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada faktor komunikasi didalam implementasi Program BSM SD di Kecamatan Sambas sudah dilaksanakan dengan baik oleh implementor, masalah yang terjadi adalah adanya ketidak pedulian orang tua siswa terhadap pendidikan anaknya. Sehingga komunikasi yang dilakukan oleh implementor sebenarnya telah sampai dan jelas kepada orang tua siswa tetapi tidak ada respon timbale balik terhadap komunikasi tersebut. Hal ini menyebabkan implementasi program BSM SD belum optimal dilaksanakan.

## **2. Analisis Sumber Daya pada program BSM SD**

Dalam pelaksanaan suatu program atau implementasi suatu kebijakan bisa saja sudah memiliki tujuan yang jelas, namun masih terdapat faktor-faktor lain yang berperan penting didalam pelaksanaan program tersebut yaitu faktor sumberdaya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu atau unsur tertentu, Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga

non-fisik (*intangibile*). Pada implementasi kebijakan Faktor sumberdaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian tujuan aturan, dan faktor tersebut harus selalu diperhatikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sumber daya, baik sumber daya manusia, fasilitas, sampai pada informasi dan wewenang masing-masing memiliki peran yang penting dan sudah memadai dipandang dari tingkat pendidikan implementor dan fasilitas yang dimiliki sekolah yang ada pada sekolah-sekolah dasar yang ada di kecamatan Sambas dalam mendukung implementasi program BSM SD yang dilaksanakan di kecamatan Sambas. Untuk informasi dan wewenang yang telah diberikan dinilai cukup dalam melaksanakan implementasi program BSM SD di kecamatan Sambas.

## **3. Analisis Disposisi Pada Program BSM SD**

Disposisi disini dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku pelaksana kebijakan atau implementor terhadap sasaran atau peserta. Menurut Edward

III (dalam Winarno, 2005:142-143) mengemukakan: "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai sikap dan perilaku positif atau mendukung terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan faktor disposisi, sikap dan perilaku implementor pada Implementasi Program BSM SD di Kecamatan Sambas sudah baik. Dimana kepala sekolah sebagai implementor juga menginginkan dana BSM mengalir kepada pihak yang tepat. Hal ini di tunjukkan dengan implementor mengikuti JUKLAK yang ada.

#### **4. Analisis Struktur Birokrasi Pada Program BSM SD**

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan faktor struktur birokrasi pada Implementasi Program BSM SD di Kecamatan Sambas sudah sesuai dengan panduan yang ada sebagai *standard operational procedure* (SOP). mekanisme yang dijalankan oleh para implementor bersifat mutlak mengingat hal tersebut sudah terdapat didalam buku Juklak Program BSM. Tetapi karena implementor menyadari bahwa program BSM diluncurkan diperuntukkan siswa miskin maka kepala sekolah menghimbau dan memberikan saran agar jalannya program BSM dapat berjalan dengan efektif.

## D. SIMPULAN

### 1. Simpulan

Program BSM hanya ditujukan kepada keluarga miskin untuk mencegah siswa yang berasal dari keluarga miskin putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya implementasi program BSM tentulah masih terdapat kekurangan baik dari faktor *internal* maupun *eksternal*.

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan untuk mendapatkan data-data yang kemudian data tersebut penulis kaji secara mendalam dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dengan empat faktor yaitu komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resource*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structures*). Empat faktor tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi : Penulis menarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dijalankan didalam

menyalurkan program BSM SD sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pihak Dinas yang melakukan penyuluhan kepada para kepala sekolah dan selanjutnya kepala sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Walaupun masih ada kekurangan, tapi dari penilaian penulis kurangnya partisipasi orang tua siswa menyebabkan program BSM tidak berjalan dengan efektif. Orang tua siswa yang kurang mampu dinilai enggan berpartisipasi dalam membantu sekolah memenuhi berkas yang menjadi syarat-syarat bagi penerima BSM salah satunya kartu KPS. Karena percuma saja jika implemendor mengkomunikasikan kepada target kebijakan namun target kebijakan tersebut tidak mau mendukung jalannya kebijakan tersebut.

2. Sumberdaya : mengenai sumberdaya yang mengimplementasikan program BSM sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan yang tergolong baik. Dari segi anggaran untuk

pelaksanaan program BSM pun sudah dipersiapkan di dalam anggaran. Penulis menyimpulkan bahwa fasilitas yang dimiliki tiap sekolah telah memadai hal ini dapat dilihat dari ruangan yang dimiliki sekolah yang rata-rata baru direnovasi dan mempunyai peralatan pendukung yang memadai seperti pengeras suara, laptop bahkan infokus. Mengenai informasi dan kewenangan dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa sumber daya yang ada telah mendapatkan informasi yang memadai hal ini dapat dilihat dari penyuluhan yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan. Kewenangan yang diberikan kepada implementor juga sangat luas karena kepala sekolah sebagai implementor diberi hak penuh untuk merekomendasikan siswa yang beliau anggap berhak menerima dana BSM ini

3. Disposisi : dapat disimpulkan bahwa sebenarnya implementor mempunyai sikap yang baik dimana dapat dinilai dari wawancara

dengan kepala sekolah yang melaksanakan program BSM. kepala sekolah mempunyai keinginan untuk menyalurkan dana BSM kepada siswa yang benar-benar berhak dengan cara menghimbau kepada orang tua siswa agar melengkapi persyaratan yang diperlukan. Kepala sekolah juga menjalankan tahapan penyaluran BSM dengan baik.

4. Struktur Birokrasi : penulis menyimpulkan dari segi struktur birokrasi sekolah-sekolah tersebut tidak ada menyalahi aturan. Ini dapat dilihat dari adanya pembagian tugas dan terdapatnya Juklak program BSM untuk mempermudah implementor dalam melaksanakan program BSM dengan baik.

Dari keseluruhan penelitian yang penulis menyimpulkan bahwa tidak efektifnya program BSM di Kecamatan Sambas disebabkan oleh faktor *Eksternal*. Penulis menyimpulkan demikian karena dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab 5. Pada bab tersebut dipaparkan bahwa dari orang

tua siswa miskin yang tidak mendapatkan BSM kurang berpartisipasi dengan program BSM. Orang tua siswa tersebut terkesan pasrah dan kurang peduli karena pada saat sosialisasi orang tua siswa yang tidak mampu tersebut ada yang tidak datang dan ada yang datang tetapi tidak menanyakan atau mengkonsultasikan kepada pihak sekolah. Siswa mampu yang terdaftar sebagai penerima BSM secara administrasi tidak dapat dikatakan bermasalah karena mereka mempunyai kartu KPS yang menjadi syarat utama dalam program ini, serta sekolah tidak berhak melarang siswa tersebut mengklaim dana BSM.

#### **E. SARAN**

**Komunikasi :** Dalam mengkomunikasikan program BSM sekolah telah dilakukan dengan baik, tetapi harus ditingkatkan misalnya *frekuensinya* hal ini dimaksudkan agar orang tua siswa yang banyak tidak datang karena ada keperluan pada pertemuan pertama dapat hadir. Sekolah dapat memanggil orang tua

siswa yang memang tidak mampu agar dikomunikasikan secara personal agar orang tua tersebut lebih berpartisipasi dalam program pelaksanaan Program BSM dengan mengajak orang tua siswa yang memang tidak mampu untuk mengurus persyaratan sebagai penerima BSM.

**Sumber daya :** Secara garis besar Sumber daya yang dimiliki telah mumpuni, baik dari staff, anggaran, fasilitas, serta informasi dan kewenangan. Namun sebaiknya untuk membuat program BSM dapat tersalurkan secara efektif, sebaiknya Dinas pendidikan lebih meningkatkan sumberdaya yang ada terutama pada informasi dan kewenangan. Sebaiknya Dinas Pendidikan tidak hanya melakukan penyuluhan tentang apa itu BSM dan tatacara pelaksanaannya tetapi sebaiknya Dinas Pendidikan memberikan pelatihan kepada implementor mengenai standar siswa yang berhak menerima BSM, karena telah diketahui kepala sekolah mempunyai kewenangan penuh dalam merekomendasikan siswa. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan

seperti salah target, maka pelatihan ini perlu dilakukan.

Disposisi : peran kepala sekolah harus berani dalam melakukan terobosan walaupun dapat dikatakan menyimpang dari Juklak. Sebaiknya kepala sekolah yang mempunyai wewenang harus melakukan sosialisasi hanya kepada orang tua siswa dan siswa yang memang miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepala Desa sebagai orang yang paling dekat dengan masyarakatnya. Jika harus melakukan sosialisasi kepada semua orang tua siswa sebaiknya kepala sekolah berani melarang orang tua siswa dan siswa yang memiliki kartu KPS namun berasal dari keluarga mampu untuk mengklaim dana BSM tentunya dengan cara-cara persuasif agar implementasi program BSM SD dapat berjalan secara efektif.

Struktur Birokrasi : sebaiknya dalam pembagian tugas, Dinas Pendidikan harus melihat langsung kelengkapan untuk tindakan pengawasan. Koordinasi Implementor dengan Dinas harusnya lebih

ditingkatkan lagi. Bagaimanapun setiap program haruslah ada tindakan pengawasan agar kebijakan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Harus ada evaluasi program BSM mengenai syarat-syarat utama, karena telah diketahui masih ada siswa yang berasal dari keluarga mampu mempunyai kartu KPS sebagai syarat yang utama.

Harus adanya peningkatan partisipasi orang tua siswa dalam pendidikan anaknya. Program BSM akan efektif jika penyaluran dananya dapat mencapai target yang ingin dituju sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah pada anak usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Agustino, Leo.2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjian, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moelong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Awang, Azam. 2009. *Implementasi Pemberdayaan Desa*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono, AG.2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik formulasi, implementasi, evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

-----, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Gerungan. W.A. 2000 , *Psycologi Social*, PT. Eresco Bandung, Jakarta

Dunn, William.N. 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .

Tahir, Arifin, 2010. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penerbit PT. Pustaka Indonesia Press Jakarta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: ANDI.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Dan Amandemen.

Buku petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Tahun 2013.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.

#### **Website:**

[http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57084/AULIA%20KAMAL%20ALTATUR%20-%200070910201070\\_1.pdf?sequence=1](http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57084/AULIA%20KAMAL%20ALTATUR%20-%200070910201070_1.pdf?sequence=1). Diunduh pada 20 Juni 2014

[http://dglib.uns.ac.id/pengguna.php?m\\_n=showview&id=32882](http://dglib.uns.ac.id/pengguna.php?m_n=showview&id=32882). Diunduh pada 21 Juni 2014

#### **Skripsi**

Made Wedasari tahun 2013 dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI”.

Aulia Kamal Altatur tahun 2013 dengan judul “DISKRESI

*DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN SISWA*

*MISKIN SEKOLAH DASAR  
(BSM-SD)”.*





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAI/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ghafuur Kharisma Ramadhan  
NIM / Periode Lulus : E42010003 / 2014  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [ghafuur.kharisma@yahoo.com](mailto:ghafuur.kharisma@yahoo.com) / 085389409423

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM  
SD) DI KECAMATAN SAMBAS**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal .....*IP*.....

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 12 Februari 2015

Dr. H. Wijaya Kusuma, MA  
NIP. 19620214 198603 1 001

(GHAFUUR KHARISMA RAMADHAN)